

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi ternyata tidak hanya mempermudah kehidupan kita sehari-hari. Namun majunya teknologi mempermudah sebagian orang dalam melakukan kejahatan seperti melakukan kecurangan perusahaan atau lembaga lainnya. Perusahaan harus memperhatikan perkembangan kasus *fraud* untuk dapat meningkatkan kemampuan perusahaan dalam mengambil tindakan terhadap kasus penipuan yang terjadi. Semakin baik perusahaan dalam mengidentifikasi dan bereaksi terhadap penipuan maka akan membatasi potensi kerusakan yang lebih parah atau kerugian yang dialami perusahaan.

Suatu perusahaan nirlaba haruslah menyajikan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Tujuan utama laporan keuangan nirlaba adalah menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan para donatur, anggota organisasi dan kreditor. Sebab perusahaan nirlaba dengan kegiatan dalam perusahaan bisnis keduanya sama-sama tidak terlepas dari pertanggungjawaban dana yang digunakan. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan nirlaba yaitu jenis dan jumlah arus kas masuk dan arus kas keluar sumber daya satu periode dan hubungan antara keduanya. Laporan keuangan ini tentu menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Informasi akuntansi yang memiliki integritas yang tinggi akan dapat diandalkan karena merupakan suatu penyajian yang jujur sehingga memungkinkan pengguna informasi akuntansi bergantung pada informasi tersebut.

Yayasan mempunyai kedudukan yang mandiri sebagai akibat adanya kekayaan yang terpisah dari kekayaan pribadi pendiri atau pengurusnya sesuai dengan UU No. 28/ 2004 tentang perubahan atas UU No. 16/ 2001 dalam Pasal 1 ayat (1) tentang Yayasan yaitu badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.

Potensi kekeliruan informasi dalam data seringkali terjadi. Biasanya dalam sebuah perusahaan atau lembaga akan melakukan suatu hal yang dikenal dengan nama audit. Proses ini memiliki peran besar dalam kinerja suatu perusahaan atau lembaga agar dapat mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan yang terkumpul. Data atau informasi yang tertulis di dalam suatu laporan akan diperiksa secara mendetail dan memastikan tidak ada data yang melenceng. Penerapan prinsip akuntansi yang konsisten merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan untuk menyusun laporan keuangan. Prinsip akuntansi yang digunakan perusahaan tidak terlepas dari pengalaman, alasan dan kegunaan prinsip tersebut. Prinsip tersebut dikenal dengan nama Prinsip Akuntansi Berlaku Umum (*Generally Accepted Accounting Principles*). Salah satu bagian dari *Generally Accepted Accounting Principles* (GAAP) di Indonesia yaitu PSAK, dimana terdapat suatu prinsip yang mengharuskan akuntan membuat keputusan dalam banyak penilaian yang mempengaruhi laporan keuangan. Prinsip tersebut lebih dikenal dengan nama *konservatisme* akuntansi.

Dalam kasus yang terjadi dalam penelitian ini yaitu mengenai kompensasi yang diterima para petinggi Aksi Cepat Tanggap (ACT) sangat fantastis, berbeda jauh dengan lembaga sejenis seperti Rumah Zakat dan Dompot Dhuafa. Aksi Cepat Tanggap (ACT) diduga menyalahgunakan anggaran untuk kepentingan pribadi pimpinannya. Lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT) memangkas dana sosial *Corporate Social Responsibility* (CSR) hingga 20% untuk pembayaran gaji pengurus pembina dan pengawas di lembaga tersebut juga mendapat dana operasional yang bersumber dari potongan donasi tersebut. Aksi Cepat Tanggap (ACT) mendapat dana sosial dari sejumlah perusahaan. Kemudian, terdapat juga beberapa donasi masyarakat umum, donasi kemitraan perusahaan nasional dan internasional, donasi institusi non korporasi dalam negeri maupun internasional hingga donasi dari komunitas ataupun anggota lembaga tertentu. Dalam hal ini, polisi menyelidiki dugaan penyelewengan dana donasi yang dikelola lembaga tersebut untuk kepentingan pribadi (*Diakses: pada tanggal 10 Agustus 2022 sumber, cnnindonesia.com*).

Selain itu, biaya operasional Aksi Cepat Tanggap (ACT) dengan jumlah 13,7% dari penerimaan dianggap melebihi beberapa ketentuan. Sebagai bagian dari

akuntabilitas keuangannya Aksi Cepat Tanggap (ACT) secara rutin memberikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) kepada donatur dan pemangku kepentingan lainnya, serta mempublikasikannya melalui media massa. Namun, telah ditemukan adanya rekayasa terkait laporan keuangan yang membuat lembaga Aksi Cepat Tanggap (ACT) mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Direktur Budi Setyars mengatakan kewajaran 12,5% untuk hak penyelenggaranya, tapi kenyataannya lebih dari itu yaitu 13,7%. Selain audit keuangan, untuk organisasi yang menjalankan transaksi berbasis syariah diperlukan audit syariah. Dalam Good Governance ditandai oleh adanya prinsip kewajaran (*fairness*). Berdasarkan penyelidikan, telah ditemukan beberapa potongan dana donasi yang tidak wajar. Dana pengumpulan untuk masjid di Australia yang mestinya Rp. 3 Miliar, tapi yang sampai ke lembaga penerima itu tinggal sekitar Rp. 2 Miliar. Majalah tempo juga menemukan fasilitas pribadi yang diberikan kepada petinggi ACT cukup fantastis. Gaji beberapa petinggi sekitar 50-250 juta (Diakses: pada tanggal 10 Agustus 2022 sumber, *kompas.com*)

Fenomena ini jelas menunjukkan terjadinya manipulasi informasi akuntansi sebagai kegagalan dari integritas laporan keuangan untuk memenuhi informasi para pengguna laporan keuangan tersebut. Oleh karena itu perlu dianalisis untuk mengetahui pengungkapan CSR dan Kualitas Audit pada Lembaga Kemanusiaan di Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT). Faktor pertama yang mempengaruhi laporan keuangan yaitu *Corporate Social Responsibility (CSR)*. *Corporate Social Responsibility (CSR)* merupakan kewajiban entitas kepada pihak berkepentingan termasuk rakyat dan lingkungan eksternal yang ditimbulkan dari kegiatan operasional perusahaan. Perusahaan atau entitas yang melakukan kegiatan *Corporate Social Responsibility (CSR)* serta mengungkapkan kegiatan *Corporate Social Responsibility (CSR)* tersebut dalam laporan keuangan mereka, maka akan mendapatkan manfaat yaitu peningkatan citra yang positif dari investor dan masyarakat.

Penelitian Mardiana dan Ayuningrum (2019) perhitungan besarnya dana CSR sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No PER-03/MBU/ 2016 yaitu sebesar maksimal 4% dari laba setelah pajak namun dampak yang dirasakan oleh masyarakat belum sepenuhnya dirasakan terutama pada bidang

pendidikan dan kesehatan. Semua informasi dalam laporan keuangan telah diungkapkan dengan lengkap dan benar serta tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material. Menurut penelitian Rinovian dan Suarsa (2018) bahwa pengungkapan CSR pada Bank Syariah Mandiri dan Bank Syariah Bukopin masih sangat terbatas, serta masih jauh dari sesuai dengan syariah *enterprise theory* karena masih menggunakan dana non halal pada sumber dana CSR yang seharusnya dipisahkan antara pengungkapan dan pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* diwajibkan kepada perusahaan yang berkaitan langsung dengan sumber daya alam dan belum menyajikan laporan tanggung jawab sosial pada program ketenagakerjaan dan konsumen dengan rincian alokasi dan bukan hanya hasil deskripsi kegiatan saja.

Pengguna laporan keuangan memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor, karena mereka selalu berasumsi bahwa laporan keuangan yang diaudit oleh auditor biasanya berkualitas tinggi dan terjamin kebenarannya. Kualitas audit yang baik juga dapat memungkinkan auditor untuk menemukan kesalahan dalam laporan keuangan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Khoirunnisa (2021) bahwa kualitas audit baik sebelum pandemi Covid-19 maupun pada saat pandemi Covid-19 dipengaruhi oleh kinerja keuangan, ukuran perusahaan, *gearing ratio*, dan *audit tenure*. Audit jarak jauh dapat dijadikan sebagai alternatif dan langkah tanggap auditor dalam pelaksanaan prosedur audit di masa pandemi Covid-19. Keterbatasan memperoleh bukti audit melalui audit jarak jauh diantaranya auditor tidak bisa melakukan pengamatan secara langsung. Selain itu, audit jarak jauh dapat menghambat komunikasi dengan *auditee*. Menurut penelitian Teri dan Ridwan (2021) menggambarkan kualitas audit dari pandangan *fee audit* dan siri'na pacce terdapat lima point penting yaitu kompetensi audit, tekanan waktu, pengalaman kerja serta independensi dan nilai dalam pelaksanaan audit, ibu Ardaniah selaku pemilik Kantor Akuntan Publik (KAP) Ardaniah Abbas melibatkan siri'na pacce sebagai pegangan dalam menaati aturan. Berikut data yang tersaji penerimaan dana CSR pada tahun 2016-2020 pada Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT):

Tahun	Penerimaan Dana CSR
2016	13.073.898.237
2017	4.336.700
2018	712.333.025
2019	229.542.280
2020	90.378.553

Sumber: Data Laporan Arus Kas ACT

Berdasarkan dari beberapa penelitian tentang pengungkapan CSR dan kualitas Audit dimana terdapat beragam pengetahuan mengenai pengungkapan CSR dan kualitas audit dari berbagai objek penelitian maka peneliti mencoba untuk mengkaji pengungkapan dan kualitas audit pada Lembaga Kemanusiaan di Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT). Melihat fenomena terkait dengan pengungkapan CSR dan Kualitas Audit menarik untuk dilakukan kajian lebih lanjut. Maka penelitian ini bermaksud untuk meneliti tentang **“Analisis Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Dan Kualitas Audit (Pada Lembaga Kemanusiaan Yayasan Aksi Cepat Tanggap Cabang Jakarta Pusat)”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah **“Bagaimana Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Dan Kualitas Audit Pada Lembaga Kemanusiaan Yayasan Aksi Cepat Tanggap Cabang Jakarta Pusat?”**

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Dan Kualitas Audit Pada Lembaga Kemanusiaan Yayasan Aksi Cepat Tanggap Cabang Jakarta Pusat.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi beberapa pihak, yaitu:

1) Bagi Segi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang dihasilkan untuk membantu Lembaga Kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap (ACT) dalam menilai kualitas audit dan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sehingga ACT dapat menentukan kebijakan apa yang akan digunakan selanjutnya.

2) Bagi Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada Pemerintah dalam menentukan pengambilan keputusan guna memperoleh citra positif Aksi Cepat Tanggap.

3) Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan pengungkapan CSR dan Kualitas Audit pada Lembaga Kemanusiaan Yayasan Aksi Cepat Tanggap yang diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan, serta dapat dijadikan salah satu referensi bagi pembaca yang tertarik melakukan penelitian lebih lanjut.